

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran penting sektor kehutanan sebagai modal dalam upaya mewujudkan agenda target pembangunan nasional, menuntut konsekuensi pemberdayaan potensi sumber daya hutan yang dikelola secara arif dan bijaksana. Hal ini untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, hingga dapat terus memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sektor kehutanan melalui kegiatan pengusahaan hutan produksi dan industrialisasi kehutanan selama tiga dekade lebih telah memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pembangunan nasional. Selama periode tersebut sektor kehutanan telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pendapatan pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Akan tetapi dalam perkembangannya yang pesat selama ini, sektor kehutanan telah menimbulkan persoalan-persoalan yang kompleks bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Berkurangnya pasokan bahan baku kayu dari hutan alam, rendahnya realisasi pembangunan hutan tanaman industri (HTI) untuk menghasilkan kayu pulp dan kayu pertukangan, serta inefisiensi produksi telah menyebabkan produksi hasil hutan menurun sehingga banyak perusahaan pengolahan kayu yang rugi dan terilit hutang. Beberapa perusahaan pengolahan kayu bahkan diduga mengkonsumsi kayu ilegal dari hutan alam dalam proses produksinya. Akibatnya, bukan saja pasokan kayu bulat untuk industri

perkayuan di masa depan terancam, tapi juga kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan degradasi hutan semakin parah.

Hal ini menunjukkan kelemahan Indonesia sebagai negara tropis yang belum dapat memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya, khususnya dalam memanfaatkan produktivitas hutan tanaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara bukan tropis. Selain itu masalah lingkungan dan konflik akibat kelangkaan sumberdaya hutan pun meningkat, diiringi dengan menurunnya manfaat jasa lingkungan hutan serta keanekaragaman hayati. Di pihak lain, para penebang liar dan konsumen kayu ilegal terus menikmati keuntungan yang sangat menggiurkan, sementara masyarakat luas harus menanggung dampak negatif yang luar biasa akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

Untuk mengatasi persoalan yang sungguh berat dan pelik di sektor kehutanan, pemerintah melalui kementerian kehutanan telah menetapkan lima prioritas kebijakan sektor kehutanan. Karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan kehutanan secara nasional tidak mungkin terlepas dari sukses pembangunan kehutanan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembangunan kehutanan mengacu kepada 5 (lima) kebijakan prioritas bidang kehutanan sesuai keputusan Menteri Kehutanan No. SK 456/Menhut – VII /2004 tanggal 29 November 2004, yaitu:

1. Pemberantasan pencurian kayu (*illegal logging*) dalam hutan negara dan perdagangan ilegal.
2. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
3. Revitalisasi sektor kehutanan.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sektor kawasan hutan.
5. Pemantapan kawasan hutan. (RPJM Dinas Kehutanan SU 2006-2010)

Berkaitan dengan prioritas ketiga, yaitu revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan dan prioritas keempat, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, pemerintah merencanakan percepatan pembangunan hutan tanaman industri dengan target 5 juta hektar sampai tahun 2009. Disamping itu, Departemen Kehutanan menetapkan target untuk membangun 5,4 juta hektar hutan tanaman rakyat, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.

Akan tetapi pemerintah dan para praktisi sektor kehutanan menyadari selama persoalan kesenjangan kebutuhan bahan baku bagi sektor industri perkayuan masih terjadi, akibat ketidakmampuan pasokan oleh produsen hasil hutan kayu, maka ditambah persoalan pembalakan liar yang terus berlangsung faktor tersebut tetap akan menjadi penghambat revitalisasi industri kehutanan. Masa depan industri perkayuan Indonesia pun disadari akan tergantung pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan relatif luas. Berdasarkan data mengenai luas kawasan hutan Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, yang disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), dinyatakan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 3.742.120 Ha. Meliputi jenis hutan konservasi, lindung, produksi terbatas, dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan luas areal hutan lainnya di provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera seperti yang tersaji pada Tabel 1.1, maka luas hutan di Provinsi Sumatera Utara menempati urutan kedua di bawah luas hutan Provinsi Riau. Sedangkan untuk ruang lingkup nasional luas kawasan hutan di Sumatera Utara mencapai 2,73 persen dari total luas kawasan hutan di Indonesia.

Tabel 1.1. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Menhut Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan

Provinsi	SK MENHUT	TOTAL KAWASAN HUTAN (Ha)	PERSENTASE
NAD	170/KPTS-II/2000	3.549.813,00.-	2.59
Sumatera Utara	44/MENHUT-II/2005	3.742.120,00.-	2.73
Sumatera Barat	442/KPTS-II/1999	2.600.286,00.-	1.90
Riau	173/ KPTS-II/1986	9.456.160,00.-	6.90
Jambi	421/ KPTS-II/1999	2.179.440,00.-	1.59
Bengkulu	420/KPTS-II/1999	920.964,00.-	0.67
Sumatera Selatan	76/KPTS-II/2001	3.759.327,00.-	2.74
Bangka Belitung	357/MENHUT-II/2004	657.510,00.-	0.48
Lampung	256/ KPTS-II/2000	1.004.735,00.-	0.73
Papua	891/KPTS-II/1999	42.224.840,00.-	30.80
Provinsi Lainnya		66.995.273,00.-	48.87
TOTAL		137.090.468,00.-	100

Sumber: Badan Planologi Kehutanan-DEPHUT, 2007

Dengan luas kawasan hutan yang relatif luas, maka dari sisi ekonomis sektor kehutanan di Sumatera Utara memiliki potensi yang relatif besar. Sehingga harapan bahwa sektor kehutanan masih mampu memberikan kontribusi ekonomi seperti, pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor non migas, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Secara spesifik jika dilihat dari luas penutupan lahan didalam dan diluar kawasan hutan berdasarkan jenis dan kegunaan hutan di Sumatera Utara, maka jenis dan kegunaan hutan yang dapat di produksi yaitu: Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi meliputi kawasan hutan maupun non hutan luasnya cukup signifikan bagi pengembangan potensi sektor kehutanan. Untuk hutan produksi saja luasnya sekitar 546.490 ha, kemudian untuk hutan produksi terbatas luasnya mencapai 1.741.990 ha, dan kawasan hutan produksi konversi sebesar 360.430 ha. Kondisi luas penutupan lahan didalam dan luar kawasan hutan Sumatera Utara tersaji pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Luas Penutupan Lahan Didalam /Luar Kawasan Hutan Sumatera Utara

Kawasan	Kawasan Hutan						APL (1000ha)	Total (1000ha)
	Hutan Tetap					Jumlah		
	KSA- KPA	HL	HPT	HP	HPK			
Hutan	237,63	725,10	632,07	237,59	59,70	1.892,10	91,97	1.984,06
Non Hutan	31,97,	773,61	1.049,76	305,54	295,59	2.456,47	2.551,01	5.007, 48
Tdk ada data	0,32	51,64	60,16	3,80	5,13	121,07	24,88	145,94
	269,93	1.550,35	1.741,99	546,94	360,43	4.469,63	2.667,85	7.137,48

Ket : Data penutupan lahan dari hasil pemertiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 2002/2003, Data kawasan hutan Sumatera Utara menurut TGHK KSA-KPA : Kawasan Suka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Tandan Baru HL : Hutan Lindung HPT : Hutan Produksi Terbatas HP : Hutan Produksi APL : Areal Penggunaan Lain HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi

Apabila dikaitkan dengan kebijakan prioritas sektor kehutanan di Indonesia seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dua point penting yang harus segera dicapai oleh sektor kehutana di Sumatera Utara pertama adalah revitalisasi sektor kehutanan. Hal-hal yang mendorong perlunya revitalisasi kehutanan baik di tingkat nasional maupun Sumatera Utara adalah: (1) menurunnya peran dan fungsi kehutanan dalam pembangunan nasional akibat meningkatnya degradasi sumberdaya hutan; (2) masih dimilikinya keunggulan komparatif sektor kehutanan, dimana Indonesia masih menyisakan kawasan hutan yang cukup luas dan bisa berfungsi sebagai paru-paru hijau dunia yang kaya dengan keanekaragaman hayati; (3) dalam jangka panjang sektor kehutanan dapat kembali menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional (devisa, lapangan kerja, dll); (4) meningkatnya permintaan pasar atas produk kehutanan secara nasional maupun global; (5) industri kehutanan dalam arti luas (pengelolaan hutan lestari: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu /Hak Pengusahaan Hutan, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri; industri pengolahan dan jasa lingkungan) masih mempunyai daya saing yang mampu berkompetisi secara global; (6) untuk meningkatkan

taraf perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dimana 10,2 juta orang dari 48,8 juta orang yang bergantung kehidupannya pada sumber daya hutan tergolong miskin; dan (7) rendahnya resistensi industri-industri sektor kehutanan, dimana rata-rata hanya berbasiskan pada keunggulan bahan baku. (RPJM 2004-2009)

Menurunnya peran dan fungsi kehutanan dalam pembangunan nasional dapat dilihat melalui kontribusi sektor kehutanan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data mengenai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Indonesia seperti yang disajikan pada tabel 1.3. terlihat bahwa dalam dasawarsa terakhir kontribusi sektor kehutanan memang telah mengalami trend penurunan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 1997 nilai output sektor kehutanan sebesar Rp. 9.806,5 milyar rupiah atau mencapai 1,56 persen dari total PDB Indonesia, maka pada tahun 2006, kontribusi sektor kehutanan terhadap pembentukan PDB Indonesia "hanya" mencapai 0,90 persen dengan nilai output sekitar Rp. 30.017,1 milyar.

Turunnya kontribusi sektor kehutanan khususnya dan sektor pertanian umumnya pada pembentukan PDB Nasional terutama disebabkan dengan terjadinya pergeseran struktur perekonomian daerah-daerah di Indonesia, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya sumbangan sektor kegiatan ekonomi sekunder dan tersier di perekonomian regional di Indonesia. Beberapa faktor lain yang juga menekan peningkatan laju output sektor kehutanan di Indonesia adalah dengan diberlakukannya beberapa regulasi yang membatasi eksploitasi hutan secara berlebihan terkait isu lingkungan yang semakin gencar dilakukan.

Pararel dengan kondisi nasional, fenomena semakin menurunnya peran sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi di tingkat nasional juga terjadi di Sumatera Utara. Jika dilihat kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir walaupun mengalami fluktuasi, namun secara umum dapat disimpulkan mengalami kondisi yang semakin menurun.

Tabel 1.3. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku, Periode 1997-2006

TAHUN	PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDB (%)
	Sektor Kehutanan	TOTAL PDB	
1997	9.806,5	627.695,9	1,56
1998	11.700,5	955.753,9	1,22
1999	13.803,8	1.099.731,8	1,26
2000	16.343,0	1.389.769,9	1,18
2001	16.962,1	1.646.322,0	1,03
2002	17.602,4	1.821.833,0	0,97
2003	18.414,6	2.013.674,6	0,91
2004	20.290,0	2.295.826,2	0,88
2005	22.561,8	2.784.960,4	0,81
2006	30.017,0	3.338.195,7	0,90

Sumber: BPS 2008

Dalam struktur perhitungan PDRB Sumatera Utara, sektor kehutanan merupakan salah satu sub-sektor dari lima sub-sektor di sektor pertanian. Peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Sumatera Utara masih relatif dominan, dimana kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) merupakan sektor yang mampu menyumbang rata-rata sekitar 24 persen dari total PDRB Sumatera Utara. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisinya relatif paralel dengan sektor kehutanan nasional, yang mengalami penurunan kontribusi bagi pembentukan PDRB Sumatera Utara.

Berdasarkan Tabel 1.4. dapat dilihat bahwa di tahun 2000 kontribusi sektor kehutanan Sumatera Utara mencapai 1,36 persen. Kemudian di tahun 2001 mengalami peningkatan ke level 1,40 persen, dan selanjutnya kontribusi sektor kehutanan semakin

menurun, seiring dengan menurunnya peran sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara. Untuk tahun 2006 sumbangan sektor kehutanan dalam pembentukan PDRB Sumatera Utara "menyusut" ke level 1,07 dan terus menurun pada tahun 2007 sebesar 0,98 persen dan merupakan level terendah dalam dasawarsa terakhir. Pada tahun 2008 kontribusi sektor kehutanan kembali meningkat ke tingkat 1,07 persen dari total PDRB Sumatera Utara.

TABEL 1.4. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku, Periode 2000-2008.

KLASIFIKASI USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
SEKTOR PERTANIAN	27,42	26,95	26,94	24,94	24,47	23,98	22,18	21,08	22,22
- Bahan Makanan	10,15	10,14	10,02	9,15	8,52	8,63	7,72	6,14	7,42
- Tanaman Perkebunan	9,86	9,37	9,67	9,08	9,87	9,50	9,06	9,51	9,26
- Peternakan	2,88	2,79	2,85	2,66	2,40	2,24	2,06	2,23	2,16
- Kehutanan	1,36	1,40	1,38	1,39	1,27	1,19	1,07	0,98	1,07
- Perikanan	3,17	3,25	3,01	2,67	2,41	2,42	2,26	2,21	2,30
BUKAN PERTANIAN	72,58	73,05	73,06	75,06	75,53	76,02	77,82	78,92	77,78
TOTAL PDRB	100								

Sumber: BPS 2008

Sedangkan khusus sektor kehutanan Provinsi Sumatera Utara maka menurut jenisnya produksi hasil hutan masih didominasi oleh hasil hutan kayu. Dari beberapa jenis kayu tersebut maka jenis kayu log pinus merupakan produksi hasil kayu terbesar di Sumatera Utara pada tahun 2005. Pada tahun 2005 hasil hutan kayu log pinus mencapai 874.056 M³ jauh lebih rendah dari pada produksi tahun 2003 yang mencapai 1.011.910,61 M³. Hal ini juga terjadi pada produksi log rimba yang produksinya pada tahun 2005 adalah sebesar 77.072,11 M³, juga jauh dengan tingkat produksi pada tahun 2002 yang mencapai

972.062,00 M³. Secara umum seluruh hasil utama produksi hutan kayu Sumatera Utara mengalami trend menurun, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut.

Tabel 1.5. Produksi Hasil Sumatera Utara menurut Jenis Produksi

Jenis Produksi	Unit	2002	2003	2004	2005
Hasil Utama					
Log Rimba	M ³	972.062,00	70.900,76	74.550	77.073,11
Log Pinus	M ³	14.153,00	1.011.910,61	700.462,84	874.056,00
Kayu Gergajian	M ³	102.269,63	90.652,41	73.723,79	88.195,63
Kayu Lapis	M ³	142.176,17	173.589,25	111.801,19	155.062,09
Pulp	Ton	-	113.266,77	124.716,50	171.248,26
Block Board	M ³	33.953,38	1.358,77	337,73	714,98
Moulding	M ³	33.953,38	26.116,14	5.036,77	34.462,00
Hasil Ikutan					
Rotan	Ton	18.134,00	672.995,00*	682	25.380,00
Arang	Ton	393.057,00	185,57	187,42	-
Getah Tusam	Kg	1.344,00	174.067,00	295,63	1285,39

Sumber: Dinas Kehutan Prov. Sumatera Utara

*) Batang

Untuk meningkatkan produksi hasil hutan kayu pada saat ini menghadirkan kondisi yang dilematis. Keberadaan hutan memang memiliki nilai ekonomi tinggi dan disamping itu juga memegang peranan yang sangat vital dalam mengatur sistem kehidupan. Disatu sisi hutan merupakan penghasil kayu dan juga merupakan penghasil produk/jasa lingkungan sebagai kompetisinya. Artinya, jika hutan dibiarkan akan menjadi produk dan menyediakan jasa lingkungan, dimana tanaman hutan dapat berfungsi sebagai penyerap karbon (*sink*) di udara, terutama sekali untuk tanaman-tanaman yang masih muda. Tidak bisa dibayangkan jika hutan di muka bumi ini semuanya habis, maka berapa besar biaya yang harus ditanggung untuk mengurangi emisi karbon tersebut. Dengan demikian, harus disadari bahwa sumber daya hutan mempunyai daya dukung dan pemanfaatan yang terbatas, meskipun merupakan sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*).

Belakangan ini marak di berbagai media masa baik lokal maupun nasional, bahwa hutan Indonesia sedang mengalami sakit parah (*high crisis*). Itu diwarnai oleh laju deforestasi yang terus meningkat dengan cepat. Dibeberapa kawasan seperti pulau Papua, Sumatera, dan Jawa tingkat deforestasi relatif tinggi, dimana mencapai lebih dari 140.000 ribu ha pertahunnya, bahkan di kawasan Pulau Sumatera tingkat deforestasi mencapai rata-rata 269.00 ha pertahunnya dan merupakan tingkat deforestasi hutan tertinggi si Indonesia

Untuk skala nasional secara umum tingkat deforestasi rata-rata 1 juta ha pertahunnya, sehingga dengan tingkat deforestasi tersebut maka diperhitungkan 60 tahun ke depan hutan di Indonesia akan segera habis.

Tabel 1.6. Perhitungan Deforestasi Di Indonesia Tahun 2000-2005 (Ha/Tahun)

Pulau	2001	2002	2003	2004	2005	Total	Rerata
Sumatera	259.500	202.600	339.000	208.700	335.700	1.345.500	269.100
Kalimantan	212.000	129.700	480.400	173.300	234.700	1.230.100	246.020
Sulawesi	154.000	150.400	385.800	41.500	134.600	866.300	173.260
Maluku	20.000	41.400	132.400	10.600	10.500	214.900	42.980
Papua	147.200	160.500	140.800	100.800	169.100	718.400	143.680
Jawa	118.300	142.100	343.400	71.700	37.300	712.800	142.560
Bali, NTT	107.200	99.600	84.300	28.100	40.600	359.800	71.960
Indonesia	1.018.200	926.300	1.906.100	634.700	962.500	5.447.800	1.089.560

Sumber: Badan Planologi Kehutanan-DEPHUT, 2007

Kerusakan dan kehilangan hutan merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, bukan berarti kita tidak boleh optimal menggunakan hutan. Yang perlu dihindarkan adalah eksploitasi hutan secara berlebihan. Pengrusakan hutan yang biasa terjadi pada hutan meliputi 3 kegiatan yaitu, pertama ketika terjadi pembukaan lahan hutan untuk wilayah transmigrasi (adanya tekanan penduduk), kedua pada hutan ekstraktif

dengan tujuan komersil termasuk *illegal logging* dan tidak terkait dengan tekanan penduduk. Jenis terakhir yaitu hutan industri dengan penyalahgunaan HPH dan penyimpangan wewenang lainnya. (Hartwick dan Ollewiler, 1998)

Dari kacamata ekonomi, kegiatan produksi hutan kayu dan perilaku produsen tidak dapat disalahkan sepenuhnya terhadap tingkat kerusakan hutan. Selama permintaan pasar tetap tinggi maka sisi penawaran akan tetap berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Tingginya permintaan hasil hutan kayu, terutama terdapat pada sektor-sektor industri yang merupakan penyerap utama hasil hutan yaitu industri kayu dan barang dari kayu serta industri kertas dan barang cetakan. Sektor lain yang juga merupakan konsumen hasil hutan kayu adalah sektor bangunan dan konstruksi. Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan perumahan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya, maka tingkat permintaan akan hasil hutan kayu akan tetap tinggi.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan interaksi antara penawaran dan permintaan hasil hutan kayu, yakni dengan menentukan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penawaran dan permintaan hasil hutan kayu tersebut, maka dengan pendekatan ekonometrika dapat dibuat sebuah model pasar atas hasil hutan kayu, khusus dalam ruang lingkup Sumatera Utara.

Model ekonometrik dengan memperhitungkan faktor penawaran dan permintaan tersebut akan dapat menganalisis pola konsumsi dan prediksi harga atas produk hasil hutan kayu. Sehingga akan dapat ditentukan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penawaran dan permintaan hasil hutan kayu, serta peramalan akan konsumsi dan tingkat harga di masa mendatang.

Sebagai tambahan relatif tingginya tingkat deforestasi akibat penebangan hutan disebabkan oleh semakin tingginya tingkat produksi hutan kayu. Hal ini terdorong oleh semakin tingginya juga aktivitas produksi sektor-sektor industri pengolah hasil hutan kayu dan kegiatan sejenis lainnya untuk memenuhi permintaan masyarakat. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana sebenarnya interaksi antara permintaan dan penawaran hasil hutan kayu dalam menciptakan pola permintaan dan harga hasil hutan kayu.

Melalui pembentukan model ekonometrika pasar hutan kayu di Sumatera Utara, dapat dilihat bawa faktor-faktor yang mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan hasil hutan kayu di Sumatera Utara. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah: Biaya produksi yang meliputi tingkat harga hasil hutan kayu, upah, energi dan produktivitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah: tingkat output sektor industri kayu dan barang dari kayu di Sumatera Utara, sektor industri kertas dan barang cetakan di Sumatera Utara, sektor bangunan dan konstruksi di Sumatera Utara, tingkat harga hasil hutan kayu, dan tingkat pendapatan masyarakat Sumatera Utara.

Secara spesifik perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh dan stimulus perubahan variabel tingkat harga hasil hutan kayu, upah, tarif, dan produktivitas di sektor kehutanan terhadap tingkat penawaran hasil hutan kayu di Sumatera Utara?
2. Seberapa besar pengaruh dan stimulus tingkat harga hasil hutan kayu tingkat, pendapatan masyarakat, output sektor bangunan dan konstruksi, sektor industri kayu dan barang dari kayu sektor industri kertas dan percetakan terhadap tingkat permintaan hasil hutan kayu di Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh dan besaran stimulus perubahan keseluruhan variabel tingkat harga hasil hutan kayu, upah, tarif, dan produktivitas di sektor kehutanan terhadap pola penawaran hasil hutan kayu di Sumatera Utara.
2. Menganalisis pengaruh dan besaran stimulus tingkat harga hasil hutan kayu tingkat pendapatan masyarakat, output sektor bangunan dan konstruksi, sektor industri kayu dan barang dari kayu sektor industri kertas dan percetakan terhadap pola tingkat permintaan hasil hutan kayu di Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang dapat diambil adalah:

1. Menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan hasil hutan kayu di Sumatera Utara, dengan melihat tingkat elastisitas faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran produk hasil hutan kayu.
2. Sebagai masukan yang berguna bagi pembuat kebijaksanaan di Sumatera Utara, yaitu dengan cara memberikan ramalan akan pola konsumsi dan produk harga hasil hutan di Sumatera Utara di masa mendatang.